

PENGARUH KARAKTERISTIK TUJUAN ANGGARAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH STUDI PADA SKPD PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

Dr. Agustinus Salle, SE., M. Ec¹

Cornelia D. Matani, SE., M. gt (Acc)²

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih

ABSTRACT

This study aims to analyze the Effect of Characteristics of Budget Objectives and Regional Financial Management on the Performance of Local Governments in Jayapura City in order to realize good governance, and to know the factors that influence the Performance of Local Government. The data collection technique used in this study was primarily by using a questionnaire through the survey method for Civil Servants (PNS), namely the head of the section and sub-section in the 28 Regional Government Work Unit (SKPD) of the Jayapura City Government. The sampling technique uses purposive sampling. Data analysis in this study used multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the characteristics of the Budget Objective: there is no influence between budgetary participation on the performance of local governments, there is a positive and significant influence between the clarity of budget objectives on local government performance, there is no influence between budget feedback on local government performance, there is no influence between evaluation of the budget for the performance of local governments, there is no influence between the difficulty of budget objectives on the performance of local governments, there is a positive and significant influence on regional financial management on the performance of local governments.

Keywords : *Characteristics of Budget Objectives, Regional Financial Management, and Local Government Performance*

1. PENDAHULUAN

Anggaran dalam lingkup sektor publik merupakan instrumen kebijakan multifungsi yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Penganggaran merupakan bagian dari proses perencanaan yang mana perencanaan merupakan salah satu siklus manajemen organisasi. Anggaran mengungkapkan apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang (Bastian, 2006). Anggaran merupakan alat yang sangat bermanfaat dalam membantu manajemen memenuhi fungsinya yaitu perencanaan, kontrol, dan pengkoordinasi aktivitas organisasi (Hanson, 1966).

Karakteristik tujuan anggaran yang diwakili oleh variabel partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan baik anggaran, evaluasi anggaran dan kesulitan tujuan anggaran berpengaruh secara serentak terhadap kinerja, dimana tidak mendukung terhadap penelitian (Maryanti, 2002). Karakteristik tujuan anggaran dan Pengelolaan Keuangan Daerah pada penelitian ini dijadikan fokus penelitian dengan subjek Pemerintah Kota Jayapura Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik tujuan anggaran dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap kinerja pemerintah Kota Jayapura..

Terdapat lima *Budgetary Goal Characteristics* (Kenis, 1979) adalah Partisipasi Anggaran yaitu menunjukkan pada luasnya partisipasi bagi Pemerintah Daerah dalam memahami anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya dan pengaruh tujuan pusat pertanggungjawaban anggaran mereka. Kejelasan Tujuan Anggaran yaitu menunjukkan luasnya tujuan anggaran yang dinyatakan secara spesifik dan jelas, dan dimengerti oleh siapa saja yang bertanggung jawab. Umpan Balik Anggaran yaitu mengenai tingkat pencapaian tujuan anggaran tidak efektif dalam memperbaiki kinerja dan hanya efektif secara marginal dalam memperbaiki sikap manajer. Evaluasi Anggaran yaitu menunjuk pada luasnya perbedaan anggaran yang digunakan kembali oleh individu pimpinan departemen dan digunakan dalam evaluasi kinerja mereka. Kesulitan Tujuan Anggaran adalah range dari "sangat longgar dan mudah dicapai" sampai "sangat ketat dan tidak dapat dicapai".

Tujuan yang mudah dicapai gagal untuk memberikan suatu tantangan untuk partisipan, dan memiliki sedikit pengaruh motivasi. Tujuan yang sangat ketat dan tidak dapat dicapai, mengarahkan pada perasaan gagal, frustrasi, tingkat aspirasi yang rendah, dan tujuan partisipan.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 8 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 58 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 6 tentang Pengelolaan Keuangan, 2006 dan 2005). Pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kinerja menuntut adanya desentralisasi. Desentralisasi pengelolaan keuangan daerah merupakan desentralisasi administratif, yaitu pendelegasian wewenang pelaksanaan sampai pada tingkat hierarki yang paling rendah. Dalam hal ini Pengelolaan Keuangan Daerah diberi wewenang dalam batas yang telah ditetapkan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, namun mereka memiliki elemen kebijaksanaan dan kekuasaan serta tanggungjawab tertentu dalam hal sifat dan hakekat jasa dan pelayanan yang menjadi tanggungjawabnya (Coralie, 1987).

Adanya desentralisasi pengelolaan pemerintahan daerah dan tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas, memaksa pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menciptakan system pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, sistem ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara tertib, ekonomis, efektif, dan efisien serta bermanfaat untuk masyarakat. Salah satu masalah penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah tersebut adalah anggaran, anggaran bisa merupakan suatu rencana kerja jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang ditetapkan dalam proses penyusunan anggaran.

Upaya-upaya untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga otonomi yang diberikan kepada daerah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kota Jayapura sebagai salah satu daerah bagian dari Provinsi Papua yang merasakan langsung kekhususan dalam pengelolaan bidang pemerintah dan bidang fiskal sebagaimana yang diamanatkan dalam Otonomi Daerah (OTDA) dan Otonomi Khusus (OTSUS) di Papua (UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua). Implementasi Pelaksanaan OTDA dan OTSUS mengharuskan pemerintah daerah Kota Jayapura untuk menentukan prioritas program dan perencanaan pembangunan daerah dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya serta mampu menggali sumber – sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Kewenangan tersebut bertujuan untuk mendorong efisiensi ekonomi, efisiensi pelayanan publik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan perspektif di atas, maka sudah menjadi keharusan bagi pemerintah Kota Jayapura untuk menciptakan efektifitas pengelolaan keuangan daerah. Terjadinya inefektifitas pengelolaan keuangan daerah akan menyebabkan pelaksanaan pembangunan daerah tidak optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, maka riset ini menganalisis pengelolaan keuangan daerah di Kota Jayapura dalam era otonomi khusus. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengelolaan keuangan daerah, menganalisis kontribusi pendapatan dan pengeluaran daerah Kota Jayapura, serta menganalisis perencanaan pengelolaan daerah yang memberikan manfaat optimal kepada masyarakat.

Chabib (2009) Mengemukakan Kinerja pemerintah daerah adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan strategis suatu organisasi. Secara Umum juga dapat di katakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam periode tertentu. Inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah adalah *value for money*. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat adalah pertanggungjawaban mengenai pelaksana *value for money* yaitu ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumberdaya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaan diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah terus melakukan berbagai upaya dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, salah satunya dengan penyempurnaan sistem administrasi negara secara menyeluruh. Pemerintah

daerah membutuhkan sumber daya manusia yang profesional (memiliki kualitas dan kompetensi tinggi) terutama bagi yang duduk dalam jabatan.

Di era globalisasi seperti sekarang ini *Good Governance* merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik ini. Tuntutan gencar dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah agar terselenggara pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat serta adanya pengaruh globalisasi menuntut adanya keterbukaan. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Hal ini mengakibatkan pemerintah daerah semakin dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh karakteristik tujuan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Jayapura sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Pemerintah Daerah di SKPD yang dijadikan responden dalam penelitian ini merupakan subjek langsung penganggaran yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan penanggungjawab anggaran untuk program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang merupakan bentuk penjabaran dari rencana strategis SKPD, sehingga responden memiliki kaitan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang pernah dilakukan oleh Dwirinati (2015). Dalam penelitian ini menggunakan enam variabel yang terdiri dari partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran dan pengelolaan keuangan daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tempat penelitian, populasi, serta memperluas sampel dengan menggunakan seluruh SKPD pada Pemerintah Kota Jayapura. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap kinerja Pemerintah Daerah (2) Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Partisipasi Anggaran

Partisipasi anggaran pada sektor publik terjadi pada saat pembahasan anggaran, dimana eksekutif dan legislatif saling beradu argumen dalam pembahasan RAPBD. Dimana anggaran dibuat oleh eksekutif dalam hal ini Kepala Daerah melalui usulan dari unit kerja yang disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan setelah itu Kepala Daerah bersama-sama DPRD menetapkan anggaran.

Aimee & Carol (2004) menemukan mekanisme input partisipasi warga negara mempunyai pengaruh langsung pada keputusan anggaran. Keuntungan penggunakan input warga negara ke dalam operasional kota bisa membantu dewan dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk mewakili konstituen dan memberikan visi dan arahan kebijakan jangka panjang.

2.2 Kejelasan Tujuan Anggaran

Tujuan anggaran menunjukkan luasnya tujuan anggaran yang dinyatakan secara spesifik dan jelas, dan dimengerti oleh siapa saja yang bertanggungjawab. Kejelasan tujuan anggaran akan mempermudah aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran untuk mencapai target-target anggaran yang telah ditetapkan.

Syafrial (2009) menguraikan bahwa penetapan tujuan spesifik akan lebih produktif dari pada tidak menetapkan tujuan spesifik. Hal ini akan mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki sehingga dapat berimplikasi pada peningkatan kinerja.

Kenis (1979) menemukan bahwa manajer memberi reaksi positif dan secara relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan tujuan anggaran. Manajemen tingkat atas dapat meningkatkan kepuasan kerja, menurunkan ketegangan kerja, dan memperbaiki anggaran yang dihubungkan dengan sikap, kinerja anggaran, dan efisiensi biaya manajer tingkat bawah secara signifikan meningkatkan kejelasan dan ketegasan tujuan anggaran mereka.

2.2.1 Umpan Balik Anggaran

Sasaran anggaran tidak akan tercapai tanpa pemantauan secara terus menerus, kemajuan karyawan akan mencapai tujuan sasaran mereka. Dalam tahap pengendalian dan evaluasi kinerja, kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang tercantum dalam anggaran, untuk mewujudkan bidang masalah dalam organisasi dan menyarankan tindakan pembentukan yang memadai bagi kinerja yang berbeda dibawah standar informasi akuntansi, manajemen berperan untuk menyajikan umpan balik bagi manajer yang bertanggungjawab dalam mengkonsumsi sumber daya untuk mencapai sasaran anggaran.

Kenis dalam (Damanik, 2011), yang menyatakan bahwa umpan balik terhadap sasaran anggaran yang dicapai adalah variabel penting yang memberikan motivasi kepada manajer, jika anggota organisasi tidak mengetahui hasil yang diperoleh dari upayanya untuk mencapai sasaran maka ia tidak mempunyai dasar untuk merasakan kesuksesan atau kegagalan dan tidak ada inisiatif untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik, dan pada akhirnya menjadi tidak puas.

2.2.2 Evaluasi Anggaran

Evaluasi anggaran menunjuk pada luasnya perbedaan anggaran yang digunakan kembali oleh individu pimpinan departemen dan digunakan dalam evaluasi kinerja. Evaluasi anggaran dilaksanakan sebagai dasar penilaian kinerja unit kerja. (Kenis, 1979) menyimpulkan bahwa evaluasi anggaran dengan kinerja memiliki kecenderungan hubungan yang lemah. Menunjuk pada luasnya perbedaan anggaran yang digunakan kembali oleh individu pimpinan departemen dan digunakan dalam evaluasi kinerja mereka. Menurut Kenis dalam (Munawar, 2006) manajer memberi reaksi yang tidak menguntungkan untuk menunjukan anggaran dalam evaluasi kinerja dalam suatu gaya *punitive* meningkatkan kerja, menurunkan kinerja anggaran.

Menurut Ginting (2009), evaluasi anggaran menunjuk pada luasnya perbedaan anggaran yang digunakan kembali oleh individu pimpinan departemen dan digunakan dalam evaluasi kinerja mereka. Kinerja perlu diukur atau dinilai untuk mengetahui sejauh mana hal tersebut tercapai. (Istiyani, 2009) menguraikan bahwa penilaian kinerja adalah suatu sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seseorang telah melaksanakan pekerjaan masing-masing secara keseluruhan atau suatu proses yang terjadi di dalam organisasi untuk menilai atau mengetahui kinerja seseorang.

2.2.3 Kesulitan Tujuan Anggaran

Tujuan anggaran adalah jarak dari sangat longgar dan mudah dicapai sampai sangat ketat dan tidak dapat dicapai. Tujuan yang mudah dicapai gagal untuk memberikan suatu tantangan untuk partisipan, dan memiliki sedikit pengaruh motivasi. Tujuan yang sangat ketat dan tidak dapat dicapai, mengarahkan pada perasaan gagal, frustrasi, tingkat aspirasi yang rendah, dan tujuan yang partisipan.

Terdapat pemanfaatan umum bahwa anggaran yang terlalu sulit dicapai mengakibatkan para pelaksana tidak termotivasi untuk melaksanakan anggaran dan bahkan mungkin mereka menjadi frustrasi karena kemungkinan besar yang akan timbul penyimpangan yang tidak menguntungkan dalam jumlah yang tinggi. Akan tetapi anggaran yang terlalu mudah dicapai mengakibatkan para pelaksana tidak merasa ditantang untuk berprestasi karena tanpa bekerja giatpun kemungkinan akan timbul penyimpangan yang menguntungkan dalam jumlah besar.

Kenis dalam (Istiyani, 2009), bahwa manajer yang memiliki tujuan anggaran yang “terlalu ketat” secara signifikan memiliki ketegangan kerja tinggi dan motivasi kerja rendah, kinerja anggaran, dan efisiensi biaya dibandingkan untuk anggaran memiliki tujuan anggaran “tepat” atau “ketat tetapi dapat dicapai”. Hal ini mengindikasikan bahwa “ketat tetapi dapat dicapai” adalah tingkat untuk kesulitan tujuan anggaran.

Istiyani menguraikan bahwa tujuan yang sulit menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan jika menetapkan tujuan spesifik yang sedang atau mudah, maupun tujuan yang bersifat umum.

2.2.4 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan/kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan wujud dari adanya tuntutan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi manajemen pemerintahan, salah satunya adalah terkait dengan manajemen keuangan negara maupun daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan /penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Desentralisasi memberikan kesempatan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mendorong kreatifitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Individu yang terlibat dan diberi tanggungjawab dalam penyusunan anggaran akan bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan, sehingga kinerja organisasi akan semakin tinggi (Rohman, 2007).

2.2.5 Kinerja Pemerintah Daerah

Mahsun (2009) mendefinisikan Kinerja (Performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Dengan mengadopsi pendapat Mahsun diatas, kinerja pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi pemerintah daerah yang tertuang dalam strategic planning. Mahsun (2009) menyebutkan indikator kinerja bahwa indikator kinerja pemerintah meliputi indikator masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Adapun pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategi organisasi (Lohman, 2003). SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dilakukan melalui penilaian yang sistematis bukan hanya pada *input*, tetapi juga pada *output*, dan *benefit*, serta *impact* (dampak) yang ditimbulkan. Dengan demikian pengukuran kinerja merupakan dasar yang *reasonable* untuk pengambilan keputusan dan melalui pengukuran kinerja akan dapat dilihat seberapa jauh kinerja yang telah dicapai dalam satu periode tertentu dibandingkan yang telah direncanakan dan dapat juga untuk mengukur kecenderungan dari tahun ke tahun.

Kinerja merupakan efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan standar, sasaran, dan criteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Ramandei, 2009).

Perkiraan jumlah alokasi dana untuk setiap unit kerja pemerintahan daerah dan program kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu tingkat pelayanan publik, disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, sehingga identifikasi *input*, teknik produksi pelayanan publik dan tingkat kualitas minimal yang harus dihasilkan oleh su atu unit kerja menjadi syarat dalam menentukan alokasi dana yang optimal untuk setiap unit kerja pelayanan publik.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Partisipasi penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Partisipasi anggaran pada sektor publik terjadi pada saat pembahasan anggaran, dimana eksekutif dan legis'latif saling beradu argumen dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dimana anggaran dibuat oleh eksekutif dalam hal ini Kepala Daerah melalui usulan dari unit kerja yang disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan setelah itu Kepala Daerah bersama-sama DPRD menetapkan anggaran.

Kenis (1979) mengemukakan bahwa partisipasi penganggaran dapat menyelaraskan tujuan pusat pertanggungjawaban dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Lebih lanjut, dalam penelitiannya, Kenis menemukan bukti bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial, dimana salah satu variabelnya adalah kinerja anggaran (pelaksanaan anggaran).

Hasil penelitian Munawar (2006), Istiyani (2009) menunjukkan bahwa variabel partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah. Erwati (2009) juga menemukan bahwa partisipasi penyusunan Anggaran berbasis Kinerja (ABK) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja kepala SKPD Pemerintah Daerah. Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Partisipasi Anggaran Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah .

2.3.2 Pengaruh Kejelasan Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Kejelasan tujuan dapat meningkatkan kinerja manajerial, sedangkan kurangnya kejelasan mengarah pada kebingungan dan ketidak puasan para pelaksana, yang berakibat pada penurunan kinerja. Manajer yang bekerja tanpa tujuan yang jelas akan dihadapkan pada tingginya ketidak pastian atas pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya (Istiyani, 2009).

Beberapa penelitian mendukung pengaruh positif kejelasan tujuan terhadap kinerja manajerial (Imosili, 1989). Kenis (1979) menemukan bahwa manajer memberi reaksi positif dan secara relative sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan tujuan anggaran. Manajemen tingkat atas dapat meningkatkan kepuasan kerja, menurunkan ketegangan kerja, dan memperbaiki anggaran yang dihubungkan dengan sikap, kinerja anggaran, dan efisiensi biaya manajer tingkat bawah secara signifikan meningkatkan kejelasan dan ketegasan tujuan anggaran mereka.

Maryanti (2002) menemukan bahwa aparat pemerintah daerah dapat mengetahui hasil usahanya melalui evaluasi yang dilakukan secara efektif untuk mengetahui kejelasan tujuan anggaran dibuatnya dan mereka merasa puas bahwa anggaran yang dibuatnya adalah bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris di atas, karena kejelasan tujuan anggaran diharapkan akan meningkatkan kinerja para individu yang terlibat di dalamnya, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kejelasan Tujuan Anggaran Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

2.3.3 Pengaruh Umpan Balik Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Umpan balik terhadap sasaran anggaran merupakan variabel penting yang memberikan motivasi kepada manajer. Dengan adanya umpan balik yang diperoleh dari pencapaian sasaran anggaran dan dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, maka karyawan akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja unuk meminimalkan terjadinya penyimpangan terhadap anggaran (Murthi & Surjana, 2008).

Maryanti (2002) menemukan bahwa umpan balik mempunyai pengaruh positif terhadap perilaku dan sikap. Hal ini menunjukkan aparat pemerintah daerah mengetahui hasil usahanya dalam menyusun anggaran maupun dalam melaksanakan anggaran sehingga membuat mereka merasa sukses.

Steers (1975) secara empiris menemukan bahwa umpan balik dan kejelasan tujuan berhubungan dengan kinerja. Melalui eksperimen lapangan, (Kim, 1984) juga mendukung bahwa penentuan tujuan dan umpan balik secara bersama-sama berdampak pada kinerja.

Munawar (2006) menemukan bahwa aparat daerah Kabupaten Kupang mengetahui hasil usahanya dalam menyusun anggaran maupun dalam melaksanakan anggaran sehingga membuat mereka merasa berhasil.

Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris di atas, karena umpan balik anggaran diharapkan akan meningkatkan kinerja para individu yang terlibat di dalamnya, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Umpan balik Anggaran Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

2.3.4 Pengaruh Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Evaluasi anggaran merupakan alat pengendalian terhadap kinerja anggaran. Evaluasi anggaran pada dasarnya membandingkan antara anggaran dengan pelaksanaan sehingga dapat ditentukan penyimpangan yang terjadi.

Kenis (1979) menyatakan evaluasi anggaran merujuk pada tingkat dimana varian-varian anggaran dilacak kembali ke kepala departemen individu dan digunakan di dalam mengevaluasi kinerja.

Evaluasi kinerja yang lebih diprioritaskan pada evaluasi anggaran cenderung mempengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja para manajer (Ramandei, 2009).

Munawar (2006) menemukan bahwa evaluasi anggaran berpengaruh terhadap perilaku aparat pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menyiapkan anggaran mereka selalu melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan dan pada pelaksanaan anggaran, mereka juga melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan sehingga kinerja mereka menjadi lebih baik.

Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris di atas, karena evaluasi anggaran diharapkan akan meningkatkan kinerja para individu yang terlibat di dalamnya, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Evaluasi Anggaran Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

2.3.5 Pengaruh Kesulitan Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Tujuan anggaran adalah range dari "sangat longgar dan mudah dicapai" sampai "sangat ketat dan tidak dapat dicapai". Tujuan yang mudah dicapai gagal untuk memberikan suatu tantangan untuk partisipan, dan memiliki sedikit pengaruh motivasi. Tujuan yang sangat ketat dan tidak dapat dicapai, mengarahkan pada perasaan gagal, frustrasi, tingkat aspirasi yang rendah, dan tujuan partisipan. Hal ini mengidentifikasi bahwa ketat tapi dapat dicapai adalah tingkat kesulitan tujuan anggaran.

Hirst & lowy (1990) membuktikan bahwa tujuan yang sulit menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan jika menetapkan tujuan spesifik yang sedang atau mudah, maupun tujuan yang bersifat umum. Berbagai penelitian mengidentifikasi bahwa kesulitan tujuan anggaran persepsian dan kinerja berhubungan erat (Hoftsedde, 1968; Kenis, 1979; Locke & Schweiger, 1979; Mia, 1989) Kesulitan tujuan juga berhubungan positif dengan kriteria keberhasilan (Carrol & Tosi, 1979). Semakin tinggi tujuan, semakin tinggi pula kinerja (Locke, 1966, 1967).

Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris di atas, karena kesulitan tujuan anggaran diharapkan akan meningkatkan kinerja para individu yang terlibat di dalamnya, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H5 : Kesulitan Tujuan Anggaran Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

2.3.6 Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Mardiasmo (2002) dalam Warsino (2009) menyatakan bahwa: "Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Peningkatan kinerja sektor publik merupakan hal yang bersifat komprehensif, dimana setiap SKPD sebagai pengguna anggaran (badan/dinas/biro/kantor) akan menghasilkan tingkat kinerja yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan rasa tanggung jawab yang mereka miliki. Semakin bagus tingkat pengelolaan keuangan oleh pengguna anggaran maka akan semakin tinggi tingkat kinerja pemerintah"

Sedangkan Abdul Rohmah (2007) menyatakan bahwa: "Pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja menunjukkan adanya akuntabilitas kinerja yang terdapat keterkaitan antara sasaran strategis yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang dialokasikan maka dapat diasumsikan

bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik mempunyai pengaruh terhadap kinerja satu instansi atau organisasi”

Menurut Mulyadi (2001) tanpa didasarkan pada rencana kegiatan jangka panjang yang disusun sebelumnya, anggaran sebenarnya tidak membawa suatu perusahaan ke arah manapun. Maka dari itu dari kegiatan perencanaan sangat penting demi melancarkan pencapaian tujuan perusahaan. Kegiatan penganggaran yang merupakan cakupan atas kegiatan pengelolaan keuangan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan dari setiap program yang telah disusun sehingga mampu mencapai kinerja yang diinginkan.

Berdasar uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H6 : Pengelolaan Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat kausalitas. Penelitian kausalitas adalah penelitian yang ingin mencari penjelasan dalam bentuk hubungan sebab – akibat (*cause – effect*) antar beberapa konsep atau beberapa variabel atau beberapa strategi yang dikembangkan dalam manajemen (Ferdinand, 2006). Penelitian ini akan membahas faktor – faktor Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Pemerintah Kota Jayapura.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena dipandang sebagai sebuah semesta penelitian (Ferdinand, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada 33 (tigah puluh tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Jayapura. Pemilihan sampel penelitian ini didasarkan pada metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni :

Adapun Kriteria – kriteria yang akan di jadikan sampel adalah sebagai berikut:

1. Kepala bagian dan Sub bagian pada masing-masing SKPD Pemerintah Kota Jayapura.
2. Memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 1 tahun pada SKPD yang bersangkutan di Pemerintah Kota Jayapura.
3. Staf bagian keuangan 2 (dua) orang di setiap SKPD Pemerintah Kota Jayapura.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Ini merupakan penelitian jenis kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam peneliti ini adalah data primer dengan menggunakan metode survei. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari pegawai yang bekerja dipemerintahan Kota Jayapura sebagai sumber data atau responden dalam penelitian ini.

3.4 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyerderhanaan data kedalam bentuk yang lebih dapat diinterpretasikan.

Persamaan regresi dalam Peneliti ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \beta_6X_6$$

Keterangan :

- Y = Kinerja Pemerintah Daerah
 α = Konstanta

β	= Koefisien regresi
X1	= Partisipasi Anggaran
X2	= Kejelasan Tujuan Anggaran
X3	= Evaluasi Anggaran
X4	= Umpan Balik Anggaran
X5	= Kesulitan Tujuan Anggaran
X6	= Pengelolaan Keuangan Daerah
ϵ	= Kesalahan acak (Error)

3.4.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik digunakan untuk menggambarkan dan meringkas hal – hal penting dari data. statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran variabel - variabel yang diteliti. Analisis deskriptif berusaha menggambarkan karakteristik data seperti nilai rata – rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai standar deviasi.

3.4.2 Uji Kualitas Data

Komitmen pengukuran data dan pengujian suatu kuesioner atau hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian tidak akan berguna dengan baik jika instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data tidak memiliki tingkat keandalan (Reliability) dan tingkat keabsahan. Oleh karena itu, terlebih dahulu kuesioner harus diuji keandalan dan keabsahannya.

3.4.3 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana sah/valid atau tidaknya suatu kuesioner sebagai suatu instrument penelitian. Untuk menguji validitas masing-masing kuesioner, peneliti akan menggunakan teknik analisis. Pengujian validitas dapat dilakukan dengan melihat nilai, dengan kriteria sebagai berikut: jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel, maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dikatakan *valid*.

3.4.4 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan kriteria tingkat kemantapan atau konsistensi suatu alat ukur (kuesioner). Suatu kuesioner dapat dikatakan baik bila dalam pengukurannya secara berulang- ulang dapat memberikan hasil yang sama (dengan catatan semua kondisi tidak berubah). Untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini digunakan rumus Alpha Cronbach lebih dari 0,6 (Sutrisno Hadi, 1991 : 56), dimana butir tes mempunyai reliabilitas baik jika reliabilitas instrumen lebih besar dari r tabel dan untuk mengintegrasikan tingkat keterandalan instrumen maka digunakan pedoman dari Sutrisno Hadi (1984).

3.5 Uji Asumsi Klasik

Berbeda dengan alat analisis lainnya, regresi linear ganda memerlukan uji persyaratan yang sangat ketat. Uji persyaratan pada regresi linear ganda biasa disebut dengan istilah uji asumsi klasik. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

3.5.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis uji statistik (Ghozali, 2006). Pengujian dengan menggunakan uji statistik *One Sample Kolmogorov - Smirnov Test* (K-S). Jika nilai probabilitas signifikansi K-S lebih besar dari 0.05, maka data berdistribusi normal (Ghozali, 2006).

3.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji asumsi tentang multikolinearitas ini dimaksudkan untuk membuktikan atau menguji ada tidaknya hubungan yang linear antara variabel bebas (independent) satu dengan variabel bebas (independent) yang lainnya. Dalam analisis regresi ganda, maka akan terdapat dua atau lebih variabel bebas yang diduga akan mempengaruhi variabel terikatnya (dependent).

Multikolinearitas dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $< 0,1$ atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2006).

3.5.3 Uji Heterokedastisitas

Uji asumsi heteroskedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah variasi residual absolut sama atau tidak sama untuk semua pengamatan. Apabila asumsi tidak terjadinya heteroskedastisitas ini tidak dipenuhi, maka penaksir menjadi tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun besar. Kriteria yang digunakan untuk menyatakan apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak diantara data-data pengamatan dapat dilihat nilai koefisien signifikannya, dalam hal ini ditetapkan $\alpha = 0,005$. Apabila koefisien signifikan lebih besar dari α (0,005), maka dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas diantara data pengamatan tersebut, (Gujarati, 1993).

3.6 Pengujian Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya adalah suatu proposi atau tanggapan yang sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau solusi atas personal sebelum di uji, maka suatu data terlebih dahulu harus dikuantitatifkan.

3.6.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi dari setiap variable independent terhadap variable dependen :

1. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan).
2. Jika nilai signifikan = $0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan).
3. Jika t hitung $> t$ tabel, maka hipotesis diterima.
4. Jika t hitung $< t$ tabel, maka hipotesis ditolak.

3.6.2 Uji Koefisien Determinasi

Uji ini digunakan untuk menunjukkan seberapa besar prosentase variasi dalam variabel diperlukan yang dapat dijelaskan oleh variasi dalam variabel independen. Nilai R terletak antara nilai 0 dan 1. Jika R^2 semakin mendekati satu, maka semakin besar variasi dalam variabel independen. Hal ini berarti semakin tepat garis regresi tersebut mewakili hasil-hasil observasi yang sebenarnya (Wheel Wright dan Makridakis, 1995).

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Statistik Deskriptif

4.1.1 Partisipasi Anggaran (PA)

Variabel partisipasi anggaran merupakan variabel independen pertama (X_1) dari penelitian ini yang menggunakan 8 item pertanyaan, sehingga rentang teoritis yang ada sebesar 8–40. Dari Tabel 4.5 juga dapat terlihat rentang aktual variabel mempunyai nilai minimum sebesar 21 dan nilai maximum sebesar 38. Adapun juga nilai rata – rata untuk seluruh jawaban responden adalah sebesar 29,20 dan standar deviasinya sebesar 3,339. Berdasarkan hasil jawaban para responden dan hasil deskriptif, dapat dijelaskan bahwa partisipasi anggaran di Pemerintah Daerah Kota Jayapura termasuk kategori cukup rendah, dimana pengukuran ini berdasarkan nilai *mean* yang lebih mendekati kepada nilai minimum.

4.1.2 Kejelasan Tujuan Anggaran (KJTA)

Variabel kejelasan tujuan anggaran merupakan variabel independen kedua (X_2) penelitian ini yang menggunakan 5 item pertanyaan, sehingga rentang teoritis yang ada sebesar 5–25. Dari Tabel 4.5 juga dapat terlihat rentang aktual variabel mempunyai nilai minimum sebesar 14 dan nilai maximum sebesar 23. Adapun juga nilai rata - rata untuk seluruh jawaban responden adalah sebesar 19,60 dan standar deviasinya sebesar 1,899. Berdasarkan hasil jawaban para responden dan hasil deskriptif, dapat dijelaskan kejelasan tujuan anggaran di Pemerintah Daerah Kota Jayapura termasuk kategori cukup tinggi, dimana pengukuran ini berdasarkan nilai *mean* yang lebih mendekati kepada nilai maximum.

4.1.3 Umpan Balik Anggaran (UBA)

Variabel umpan balik anggaran merupakan variabel independen keempat (X_4) dari penelitian ini yang menggunakan 7 item pertanyaan, sehingga rentang teoritis yang ada sebesar 7–35. Dari Tabel 4.5 juga dapat terlihat rentang aktual variabel mempunyai nilai minimum sebesar 21 dan nilai maximum sebesar 32. Adapun juga nilai rata - rata untuk seluruh jawaban responden adalah sebesar 26,66 dan standar deviasinya sebesar 2,810. Berdasarkan hasil jawaban para responden dan hasil deskriptif, dapat dijelaskan umpan balik anggaran di Pemerintah Daerah Kota Jayapura termasuk kategori cukup tinggi, dimana pengukuran ini berdasarkan nilai *mean* yang lebih mendekati kepada nilai maximum. **Kesulitan Tujuan Anggaran (KSTA)**

Variabel kesulitan tujuan anggaran merupakan variabel independen kelima (X_5) dari penelitian ini yang menggunakan 2 item pertanyaan, sehingga rentang teoritis yang ada sebesar 2–10. Dari Tabel 4.5 juga dapat terlihat rentang aktual variabel mempunyai nilai minimum sebesar 2 dan nilai maximum sebesar 10. Adapun juga nilai rata - rata untuk seluruh jawaban responden adalah sebesar 5,92 dan standar deviasinya sebesar 1,723. Berdasarkan hasil jawaban para responden dan hasil deskriptif, dapat dijelaskan kesulitan tujuan anggaran di Pemerintah Daerah Kota Jayapura termasuk kategori cukup rendah, dimana pengukuran ini berdasarkan nilai *mean* yang lebih mendekati kepada nilai minimum.

4.1.4 Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD)

Variabel pengelolaan keuangan daerah merupakan variabel independen keenam (X_6) dari penelitian ini yang menggunakan 9 item pertanyaan, sehingga rentang teoritis yang ada sebesar 9–45. Dari Tabel 4.5 juga dapat terlihat rentang aktual variabel mempunyai nilai minimum sebesar 25 dan nilai maximum sebesar 39. Adapun juga nilai rata - rata untuk seluruh jawaban responden adalah sebesar 31,33 dan standar deviasinya sebesar 3.644. Berdasarkan hasil jawaban para responden dan hasil deskriptif, dapat dijelaskan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Daerah Kota Jayapura termasuk kategori cukup rendah, dimana pengukuran ini berdasarkan nilai *mean* yang lebih mendekati kepada nilai minimum.

4.1.5 Kinerja Pemerintah Daerah (KPD)

Variabel kinerja pemerintah daerah merupakan variabel dependen (Y) dari penelitian ini yang menggunakan 12 item pertanyaan, sehingga rentang teoritis yang ada sebesar 12 – 60. Dari Tabel 4.5 juga dapat terlihat rentang aktual variabel mempunyai nilai minimum sebesar 33 dan nilai maximum sebesar 57. Adapun juga nilai rata - rata untuk seluruh jawaban responden adalah sebesar 45,65 dan standar deviasinya sebesar 4,944. Berdasarkan hasil jawaban para responden dan hasil deskriptif, dapat dijelaskan kinerja pemerintah daerah di Pemerintah Daerah Kota Jayapura termasuk kategori tinggi, dimana pengukuran ini berdasarkan nilai *mean* yang lebih mendekati kepada nilai maximum.

4.2 Uji Koefisien Determinan

Berdasarkan hasil uji koefisien determinan diatas menunjukkan tingkat pengaruh keenam variabel independent yaitu partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, evaluasi anggaran, umpan balik anggaran, kesulitan tujuan anggaran, pengelolaan keuangan daerah, terhadap kinerja pemerintah daerah di Pemerintah Daerah Kota Jayapura ialah sebesar 36% dan sisanya 64% , jadi variabel dependent di

pengaruhi oleh faktor lain dari keenam variabel independen dalam peneliti ini. Angka tersebut dapat dilihat dari Tabel 4.16 dimana *Adjusted R Square* yang diperoleh adalah sebesar 0.360 atau 36 %.

4.3 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t) pada dasarnya menunjukkan apakah variabel independen mempunyai pengaruh secara individual atau parsial terhadap variabel dependen, dimana dalam penelitian ini variabel independennya terdiri dari partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, evaluasi anggaran, umpan balik anggaran, kesulitan tujuan anggaran, pengelolaan keuangan daerah, sedangkan yang menjadi variabel dependennya kinerja pemerintah daerah.

4.3.1 Partisipasi Anggaran (PA) Tidak Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (KPD)

Berdasarkan Tabel 4.17 diatas, variabel partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, di Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Hal ini dapat dijelaskan melalui hasil uji parsial (uji t)Pa dengan melihat nilai t hitung $-0,060 < t \text{ tabel } 1,663$ dan nilai sig. $0,952 > a 0,05$. Dengan demikian hipotesis pertama (H_1) pada penelitian ini ditolak.

4.3.2 Kejelasan Tujuan Anggaran (KJTA) Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (KPD)

Berdasarkan Tabel 4.17 diatas, variabel kejelasan tujuan anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, di Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Hal ini dapat dijelaskan melalui hasil uji parsial (uji t) dengan melihat nilai t hitung $2,668 > t \text{ tabel } 1,663$ dan nilai sig. $0,009 < a 0,05$. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) pada penelitian ini dapat diterima.

4.3.3 Evaluasi Anggaran (EA) Tidak Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (KPD)

Berdasarkan Tabel 4.17 diatas, variabel evaluasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, di Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Hal ini dapat dijelaskan melalui hasil uji parsial (uji t) dengan melihat nilai t hitung $1,006 < t \text{ tabel } 1,663$ dan nilai sig. $0,318 > a 0,05$. Dengan demikian hipotesis ketiga (H_3) pada penelitian ini ditolak.

4.3.4 Umpan Balik Anggaran (UBA) Tidak Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (KPD)

Berdasarkan Tabel 4.17 diatas, variabel umpan balik anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, di Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Hal ini dapat dijelaskan melalui hasil uji parsial (uji t) dengan melihat nilai t hitung $1,381 < t \text{ tabel } 1,663$ dan nilai sig. $0,171 > a 0,05$. Dengan demikian hipotesis keempat (H_4) pada penelitian ini ditolak.

4.3.5 Kesulitan Tujuan Anggaran (KSTA) Tidak Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (KPD)

Berdasarkan Tabel 4.17 diatas, variabel kesulitan tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Hal ini dapat dijelaskan melalui hasil uji parsial (uji t) dengan melihat nilai t hitung $-1,512 < t \text{ tabel } 1,663$ dan nilai sig. $0,135 > a 0,05$. Dengan demikian hipotesis kelima (H_5) pada penelitian ini ditolak.

4.3.6 Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (KPD)

Berdasarkan Tabel 4.17 diatas, variabel pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Hal ini dapat dijelaskan melalui hasil uji parsial (uji t) dengan melihat nilai t hitung $4,606 > t \text{ tabel } 1,663$ dan nilai sig. $0,000 < a 0,05$. Dengan demikian hipotesis keenam (H_6) pada penelitian ini dapat diterima.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Partisipasi Anggaran Tidak Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, di Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Hal ini berarti bahwa partisipasi anggaran yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kota Jayapura, karena faktor kepuasan kerja dapat memperlemah pengaruh partisipasi anggaran dan kinerja pemerintah daerah. Dimana hasil atau tingkat keberhasilan secara keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas dibanding dengan hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah terlibat dahulu dan telah disepakati bersama.

Kendala yang sering membuat keterlambatan dalam penetapan anggaran, tidak sesuai dengan daftar perencanaan anggaran tidak mungkin, kecuali misalnya SKPD mengusulkan terus SKPD tersebut merubah lagi maka usulan-usulan setiap SKPD itu ditampung dan itu yang dimasukan anggaran-anggarnya. Dalam perencanaan mereka tidak maksimal, misalnya rencana anggaran tahun ini akan dialokasikan untuk kegiatan tahun depan biasa, mungkin proses berjalan apa yang mereka rencanakan tidak seperti yang direncanakan itu mungkin terjadi, akan tetapi untuk proses menentukan anggaran tidak pernah tidak tepat karena itu usulan dari mereka sendiri dari SKPD, dalam wawancara dengan Ibu Murniati.

4.4.2 Kejelasan Tujuan Anggaran Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kejelasan tujuan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, di Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Hal ini berarti bahwa semakin jelas kejelasan tujuan anggaran dalam penyusunan anggaran maka semakin tinggi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sebaliknya jika tujuan anggaran kurang jelas maka kinerja pemerintah daerah juga akan turun di pemerintah daerah kota jayapura.

Kejelasan tujuan anggaran dalam pemerintah daerah, di tetapkan secara jelas dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran dalam kinerja pemerintah daerah. Dengan tujuan yang jelas dalam proses penganggaran, akan memberikan implikasi terhadap kejelasan tugas dan target yang dicapai, sehingga membantu mencapai tujuan organisasi sebagaimana dalam perencanaan anggaran di pemerintah daerah.

4.4.3 Evaluasi Anggaran Tidak Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa evaluasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, di Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Hal ini berarti bahwa evaluasi anggaran yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kota Jayapura evaluasi anggaran tidak dapat mengungkap sejauh mana pertanggungjawaban pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga evaluasi anggaran tidak dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, di Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Dalam melakukan kegiatan, evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui kesalahan atau kekurangan dari proses maupun hasil akhir dari kegiatan yang telah dilakukan, dan apakah kinerja pegawai tersebut dalam menyusun anggaran sudah baik atau belum untuk melakukan perubahan atau perbaikan pada kegiatan berikutnya.

Untuk evaluasi anggaran, mengevaluasi keuangan itu apakah uangan yang digukanan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, sangat berdampak terhadap masyarakat atau tidak. Harus multi guna jadi bukan hanya saja kita biaya sudah cukup tetapi berdampak baik atau tidak proyek tersebut terhadap masyarakat dengan demikian kita dapat mengevaluasi jumlah dana sekian itu sangat berfungsi sangat berdampak baik dengan dana sekian. kita evaluasi di lakukukan setelah selesainya kegiatan, dalam wawan cara dengan Bapak Krisson Samosir.

4.4.4 Umpan Balik Anggaran Tidak Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, umpan balik anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, di Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Hal ini berarti bahwa umpan balik yang diterima pegawai pemerintah daerah masih rendah, sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut Mia (2012), faktor yang menyebabkan rendahnya umpan balik tersebut salah satunya adalah ketidakpahaman pengguna anggaran dalam menilai hasil kinerja penyusunan anggaran.

4.4.5 Kesulitan Tujuan Anggaran Tidak Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kesulitan tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, di Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Hal tersebut dikarenakan kesulitan tujuan anggaran apabila kesulitan tujuan anggaran yang di tetapkan tingkat kesulitannya sangat tinggi maka kemungkinan tidak mudah untuk dicapai . Sedangkan untuk kesulitan tujuan anggaran yang mudah dicapai akan gagal untuk memberikan suatu tantangan untuk partisipasi, dan memiliki sedikit pengaruh motivasi. Tujuan anggaran tidak sulit untuk dicapai, jadi penganggaran ini berdasarkan visi misi Walikota. Visi misi walikota dijabarkan dalam RPJM (Rencana Jangka Panjang Menengah), Anggaran itu tidak asal ada. Ada RPJM (Rencana Jangka Panjang Menengah) habis itu ada RENZA (Rencana Sestrategi) SKPD ada RENJA SKPD dari situ penganggaran berdasarkan dokumen-dokumen itu, jadi anggaran itu tidak boleh lepas dari situ.

4.4.6 Pengelolaan Keuangan Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, di Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara professional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari perencanaan, pengelolaan/pemanfaatan, serta pengawasannya. Pengelolaan keuangan yang baik di dalam organisasi pemerintahan dapat pula menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang baik.

Pengelolaan keuangan daerah akan berperan aktif pada setiap kebijakan pemerintah dimana merasakan suatu tindakan kebijakan tersebut menguntungkan atau sebaliknya akan menunjukkan sikap yang kurang mendukung bahkan menolak setiap tindakan kebijakan dimana merasakan bahwa kebijakan tersebut di anggap merugikan sikap ini mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Hal itu harus diikuti dengan adanya suatu sistem pengelolaan keuangan daerah untuk mengelolanya. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud, merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut maka hendaknya sebuah pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Kejelasan tujuan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
3. Evaluasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
4. Umpan balik anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
5. Kesulitan tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
6. Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

5.2 Keterbatasan

Beberapa keterbatasan dalam peneliti ini antara lain :

1. Kurangnya responden yang diambil sebagai sampel, membuat beberapa hasil penelitian yang tidak konsisten dengan penelitian-penelitian terdahulu. Sehingga untuk hasil yang belum konsisten ini perlu untuk diuji lagi pada beberapa kinerja pemerintah daerah yang lainnya

2. Peneliti ini hanya mengambil variabel karakteristik tujuan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah sebagai dasar dalam membangun kinerja pemerintah daerah. Adanya kemungkinan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah yang belum bisa dijabarkan dalam penelitian.
3. Kurang mendalamnya analisis yang dilakukan terhadap variabel karakteristik tujuan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah maupun pada variabel kinerja Pemerintah Daerah.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan dalam peneliti ini, beberapa saran untuk penelitian kedepan adalah sebagai berikut:

1. Peneliti kedepan dapat menambah beberapa variabel yang mungkin, berpengaruh dalam melakukan penelitian tentang kinerja pemerintah daerah.
2. Kurang mendalamnya analisis yang peneliti lakukan terhadap variabel penelitian, kami menyarankan untuk penelitian kedepan, mungkin bisa lebih dalam lagi, dalam menganalisis permasalahan tersebut.
3. Meskipun ada hipotesis tidak terbukti dalam penelitian ini, peneliti tetap menyarankan untuk tetap menggunakan variabel yang tidak signifikan dalam penelitian ini, untuk diteliti ulang. Karena dalam penelitian terdahulu variabel tersebut merupakan faktor kunci yang perlu dipertimbangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul.Rohman. (2007). Pengaruh Peran Manajeial dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal, Universitas Diponegoro*.
- Aimee, F., & Carol, E. (2004). Aligning Priorities In Local Budgeting Processes. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management. Boca Raton Summer 2004 Vol. 16, Iss.2; pg 210, 18 pgs.*
- Almanda, P. (2013). Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
- Bastian, I. (2006). Sistem Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat Jakarta.
- Bungin, B. (2005). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Edisi I Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana.
- Chabib, S. (2009). Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Bandung: Fokus Media.
- Coralie, B. a. (1987). Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang, Terjemahan, LP3ES.
- Damanik, A. Z. (2011). Pengaruh Budgetary Goal Characteristics dan Keadilan Prosedural terhadap Kinerja Manajerial (Pada Pejabat Eselon III dan IV pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi). . *Tesis (tidak diterbitkan) Sekolah Pascasarjana, USU Medan.*
- Dido, P. S. (2011). Pengaruh Budgetary Goal Characteristic Terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kota Padang Sumatera Barat. *Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. .*
- Dwirianti, I. (2015). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Ekonomi Vol.2 No.2.*
- Erwati, M. (2009). Pengaruh Partisipasi Anggaran dan kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Kepala SKPD Pemerintah dengan Komitmen Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderating (Sur-vey pada aparatur Pemerintah Kota Jambi). *Jurnal Maksi, ISSN : 0854-8986, Volume 102. .*
- Ferdinand, A. (2006). Metode Penelitian Manajemen. Edisi Kedua. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozafi, f. (2005). Analisis Mudivariate dengan bantuan SPSS. *semarang: Yayasan penerbit UNDIP.*
- Ghozali, I. (2006). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.*
- Ginting, H. S. (2009). Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Pemerintahan Kabupaten Karo. *Tesis (tidak diterbitkan) Sekolah Pascasarjana, USU Medan.*
- Hanson, E. I. (1966). The Budgetary Control Function. *The Accounting Review , Hal 239-243. April 1996.*
- Ikhsan, A., & Ishak, M. (2005). Akuntansi Keperilakuan. Jakarta: Salemba Empat.
- Imosili, O. A. (1989). The Role of Budget Data in the Evaluation of Managerial Performance. *Accounting, Organizations and Society (1989). Hal 325-335. .*
- Indriantoro, N. d. (1999). Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manjemen. Yogyakarta: PT. BPF.

- Istiyani. (2009). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Temanggung). *Tesis (tidak diterbitkan) Fakultas Pascasarjana, USM Surakarta*.
- Kenis, I. (1979). Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance. *and Performance. The Accounting Review. LIV.2. Hal 707-721*.
- Kholmi. (2012). pengaruh budgetary goal characteristic terhadap sikap aparat dan menilai kinerja pemerintah daerah studi pada satuan kerja perangkat daerah kota pangka raya. *akuntansi dan keuangan ISSN:2088-0685, volume 2 : 243-250*.
- Kim, J. S. (1984). Effects of Behavior Plus Outcome Goal Setting and Feedback on Employee Satisfaction and Performance. *The Academy of Management Journal (Maret 1984) Hal 139-149*.
- Mahsun, M., Sulistyowati, F., & Purwanugrah, H. (2011). Akuntansi sektor publik (Edisi 2). *Yogyakarta, Indonesia : BPF*.
- Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Maryanti, H. A. (2002). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Perilaku, Sikap dan Kinerja Pemerintah Daerah di Propinsi Nusa Tenggara Timur. (Tesis).
- Mulyono. (2006). Audit Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Munawar. (2006). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Perilaku, Sikap dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang. (Tesis).
- Murthi, & Surjana. (2008). Pengaruh Budgetary Goal Characteristics terhadap Kinerja Manajerial pada Rumah Sakit Pemerintah di Kota Denpasar. *E-journal Universitas Udayan*.
- Nor, W. (2007). Desentralisasi dan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Manajerial. *Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makassar*.
- Pasoloran, O. (2002). Pengaruh Perceived Environment Uncertainty (PEU) Terhadap Hubungan Antara Karakteristik Sasaran Penganggaran dengan Kinerja Manajerial. *Simposium Nasional 5*.
- Pemendagri Nomor 13 tahun 2006 pasal 1 ayat 9. (2006). *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 3. (2006).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 8 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 58 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 6 tentang Pengelolaan Keuangan. (2006 dan 2005).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 5. (2005). *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Ramandei, P. (2009). "Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah. *Tesis, Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi, Universitas Diponegoro Semarang* .

- Ratnawati, K. (2004). Pengaruh Budgetary Goal Characteristics terhadap Kinerja Manajerial dengan Budaya Paternalistik dan Komitmen Organisasi sebagai Moderating Variabel. *Simposium Nasional Akuntansi 7*.
- Rohman, A. (2007). Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survey pada Pemda Kota, Kabupaten dan Provinsi di Jawa Tengah). *Jurnal Maksi, Vol 7 No 2 Agustus 2007, hal 206-220*.
- Saleh. (2004). Pengaruh Karakteristik Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah tingkat II Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal publikasi*.
- Sarjito, B. (2007). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah : Budaya organisasi dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating. *Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makassar*.
- Syafrial. (2009). Pengaruh ketepatan skedul penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun. *Tesis Magister Akuntansi, Universitas Sumatra Utara, Medan*.
- Syarifuddin. (2003). Model-model anggaran pada organisasi sector public dan perkembangannya. *Makalah seminar bulanan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin, Makassar*.
- Tonga, V. F. (2013). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Badung. *Skripsi (tidak di erbitkan). Jurusan akuntansi Universitas Warmadewa*.